

Nomor Induk :/DOK/BAPG/05
Tanggal : 16-8-2009

101 /
NOT
2002
c 2



NOTA KEUANGAN

DAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

TAHUN ANGGARAN 2002

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBN 2002	4
Pendahuluan	4
Kinerja Ekonomi Indonesia Tahun 2001	4
Perkembangan Ekonomi Global	5
Kondisi Sosial, Politik, dan Keamanan	5
Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia Tahun 2002	6
Indikator Ekonomi Makro Dalam APBN 2002	7
Pertumbuhan Ekonomi	7
Laju Inflasi	8
Nilai Tukar Rupiah	9
Suku Bunga SBI 3 Bulan	11
Harga Minyak Mentah Internasional	11
Tingkat Produksi Minyak Mentah Indonesia	12
BAB III PERKEMBANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA	13
Pendahuluan	13
Pendapatan Negara dan Hibah	13
Penerimaan Perpajakan	14
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	17
Hibah	20
Belanja Negara	20
Pengeluaran Rutin	21
Pengeluaran Pembangunan	23
Dana Perimbangan	25

	Halaman
Keseimbangan Umum dan Defisit APBN	26
Pembiayaan Defisit Anggaran	26
BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2002	29
Pendahuluan	29
Pendapatan Negara dan Hibah	30
Penerimaan Perpajakan	30
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	33
Hibah	36
Belanja Negara	37
Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	37
Pengeluaran Rutin	37
Pengeluaran Pembangunan	40
Belanja untuk Daerah	43
Dana Perimbangan	43
Dana Bagi Hasil	44
Dana Alokasi Umum	44
Dana Alokasi Khusus	45
Dana Otonomi Khusus dan Penyeimbang	46
Keseimbangan Umum dan Defisit APBN	46
Pembiayaan Defisit Anggaran	46

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

	Halaman
TABEL	
II.1 Kerangka Ekonomi Makro, 2001 – 2002	7
III.1 Perkembangan Penerimaan Perpajakan, 1999/2000 – 2001	17
III.2 Perkembangan Penerimaan Negara Bukan Pajak, 1999/2000 – 2001	19
III.3 Perkembangan Belanja Negara, 1999/2000 – 2001	21
III.4 Perkembangan Pembiayaan Defisit, 1999/2000 – 2001	27
III.5 Ringkasan Perkembangan Pelaksanaan Operasional Fiskal Pemerintah, 1999/2000 – 2001	28
IV.1 Ringkasan APBN 2001 dan APBN 2002	30
IV.2 Pendapatan Negara dan Hibah APBN 2001 dan APBN 2002	36
IV.3 Belanja Negara APBN 2001 dan APBN 2002	43
IV.4 Pembiayaan Defisit APBN 2001 dan APBN 2002	48
GRAFIK	
II.1 Pertumbuhan Ekonomi Tahunan, 1996 – 2002	8
II.2 Laju Inflasi Tahunan, 1996 – 2002	9
II.3 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Rata-rata, 1996 – 2002	10
II.4 Perkembangan Suku Bunga SBI 3 Bulan, 1996 – 2002	10
II.5 Perkembangan Harga Minyak Internasional, 1996 – 2002	11
III.1 Perkembangan Pendapatan Negara, 1999/2000 – 2001	14
III.2 Perkembangan Penerimaan Beberapa Jenis Pajak, 1999/2000 – 2001	15
III.3 Perkembangan Penerimaan Bukan Pajak, 1999/2000 – 2001	17
III.4 Perkembangan Pengeluaran Rutin, 1999/2000 – 2001	21
III.5 Perkembangan Pembiayaan Defisit Anggaran, 1999/2000 – 2001	28

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Rincian Penerimaan Perpajakan, APBN 2001 dan APBN 2002	49
Lampiran 2	Rincian Penerimaan Bukan Pajak, APBN 2001 dan APBN 2002	50
Lampiran 3	Penerimaan dan Pengeluaran Rekening Dana Investasi (RDI), APBN 2001 dan APBN 2002	51
Lampiran 4	Pengeluaran Rutin Berdasarkan Sektor dan Subsektor, APBN 2001 dan APBN 2002	52
Lampiran 5	Pengeluaran Pembangunan Berdasarkan Sektor dan Subsektor, APBN 2001 dan APBN 2002	54
Lampiran 6	Rincian Dana Perimbangan, APBN 2001 dan APBN 2002	56
Lampiran 7	Rincian Pembiayaan Anggaran, APBN 2001 dan APBN 2002	57
Lampiran 8	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002	58

BAB I

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan penjabaran rencana kerja para penyelenggara negara untuk kurun waktu satu tahun. Dalam bentuk yang paling ringkas, APBN dituangkan ke dalam suatu format yang memuat pengelompokan jenis transaksi berkaitan dengan rencana kegiatan penyelenggaraan negara menurut pengaruhnya terhadap posisi keuangan negara dalam kurun waktu setahun. Transaksi-transaksi yang berkaitan dengan rencana kegiatan tersebut dikategorikan ke dalam kelompok pendapatan negara dan hibah, belanja negara, dan pembiayaan anggaran.

Pendapatan negara dan hibah merupakan kelompok transaksi yang berakibat pada meningkatnya posisi aktiva bersih (*net worth*) dalam neraca keuangan negara, sedangkan belanja negara berakibat sebaliknya. Dengan perkataan lain, pendapatan dan hibah mencerminkan target nominal rupiah yang akan dicapai melalui pelaksanaan rencana kerja para penyelenggara negara dalam menggali sumber-sumber penerimaan negara. Sedangkan belanja negara mencerminkan pagu tertinggi dana yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan yang tercakup dalam rencana kerja para penyelenggara negara.

Selisih negatif atau positif pendapatan negara dan hibah setelah dikurangi belanja negara merupakan defisit atau surplus anggaran. Selisih negatif akan dibiayai dengan dana yang dihasilkan oleh kegiatan-kegiatan (transaksi) yang dikelompokkan dalam pembiayaan anggaran. Kelompok pembiayaan anggaran merupakan kategori transaksi yang tidak menimbulkan perubahan pada aktiva bersih, karena setiap transaksi yang termasuk dalam kelompok pembiayaan akan mempengaruhi sisi aktiva (*assets*) dan kewajiban (*liabilities*) dari neraca keuangan negara, dalam jumlah yang sama, atau dapat menimbulkan terjadinya perubahan struktur *assets* dan *liabilities* namun tidak mempengaruhi posisi keseimbangan neraca keuangan negara.

Penetapan APBN merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi antara lain, "Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan tiap-tiap tahun dengan undang-undang". Sebagai suatu kebijakan publik, proses penyusunan APBN tidak hanya berkaitan dengan penanganan teknis penganggaran (*budgeting*), analisis ekonomi dan sosial, juridis formil dan konstitusional kenegaraan, akan tetapi juga merupakan bagian dari proses politik. Sehubungan dengan hal tersebut, mekanisme penyusunannya tidak sepenuhnya dimulai pada pihak pemerintah saja, melainkan didahului dengan adanya Pembicaraan Pendahuluan antara Pemerintah dengan Panitia Anggaran DPR RI, serta komisi-komisi DPR RI dengan masing-masing mitra kerjanya. Forum-forum tersebut dimaksudkan untuk menyamakan

APBN merupakan penjabaran rancangan rencana kerja penyelenggaraan negara dalam satu tahun.

Pendapatan negara dan hibah mengakibatkan posisi aktiva bersih negara meningkat, sedangkan belanja negara berakibat sebaliknya.

Selisih negatif atau positif pendapatan negara dan hibah setelah dikurangi belanja negara selama setahun merupakan defisit atau surplus anggaran.

Penetapan APBN merupakan manifestasi pelaksanaan kewajiban konstitusional pemerintah sesuai dengan pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Prinsip umum penyusunan APBN 2002 adalah menciptakan APBN yang semakin sehat, berkesinambungan, dan bertumpu pada kemampuan pembiayaan dalam negeri.

APBN 2002 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan GBHN 1999–2004.

APBN 2002 disusun dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, serta perkembangan pelaksanaan APBN tahun anggaran 2001.

Bab II memuat uraian mengenai asumsi indikator ekonomi makro tahun anggaran 2002.

Bab III menjelaskan perkembangan pelaksanaan APBN tiga tahun terakhir.

Bab IV menjelaskan APBN 2002 dan berbagai kebijakan pendukungnya.

pandangan tentang arah dan target-target umum yang akan dicapai dalam penyelenggaraan negara pada suatu tahun anggaran. Proses politik tersebut akan berlanjut sampai dengan proses pembahasan dengan panitia anggaran dan pada tahap akhir akan ditetapkan melalui rapat paripurna DPR.

Beberapa prinsip umum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan APBN 2002 antara lain adalah APBN yang disusun harus (i) mendorong terciptanya APBN yang semakin sehat pada masa yang akan datang; (ii) sedapat mungkin dapat menjamin dipertahankannya kesinambungan anggaran; dan (iii) selalu didasarkan pada kemampuan penyediaan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri.

APBN 2002 merupakan APBN ketiga yang diajukan pemerintah sebagai pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999–2004 dan merupakan APBN yang pertama di bawah Kabinet Gotong Royong. Selain mengacu kepada GBHN 1999–2004, penyusunan APBN tahun anggaran 2002 juga mengacu kepada Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000–2004, Repeta 2002, kesepakatan-kesepakatan yang dicapai di dalam rapat-rapat pembicaraan pendahuluan dengan DPR, serta program kerja Kabinet Gotong Royong.

Sebagai suatu rencana kerja penyelenggara negara yang mencakup berbagai program dan atau kegiatan yang akan diselenggarakan oleh badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam tahun anggaran 2002, maka penyusunan APBN 2002 juga harus didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan dan perkiraan-perkiraan terhadap faktor-faktor baik eksternal maupun internal yang mempengaruhi APBN tahun anggaran 2002. Faktor-faktor tersebut pada dasarnya terdiri atas faktor kondisi perekonomian nasional dan perekonomian dunia, serta perkembangan pelaksanaan APBN sampai pada periode terkini.

Nota Keuangan dan APBN 2002, secara berurutan akan memberikan penjelasan tentang asumsi dasar penyusunan RAPBN 2002 pada Bab II, yang secara ringkas memuat uraian kinerja ekonomi Indonesia tahun 2001, perkembangan ekonomi global, kondisi sosial politik dan keamanan, dan kebijakan ekonomi makro Indonesia tahun 2002, yang mendasari perkiraan asumsi indikator ekonomi makro dalam APBN 2002. Asumsi tersebut mencakup pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah, harga minyak internasional dan tingkat produksi minyak mentah Indonesia. Asumsi-asumsi dasar tersebut telah disesuaikan dengan kesepakatan dengan DPR.

Selanjutnya, pada Bab III dijelaskan mengenai perkembangan pelaksanaan keuangan negara (APBN) selama tiga tahun terakhir yang meliputi periode tahun anggaran 1999/2000, 2000 dan 2001. Pada Bab ini diuraikan secara ringkas mengenai arah perkembangan pendapatan negara dan hibah, belanja negara dan pembiayaan anggaran, serta berbagai kebijakan yang berpengaruh terhadap perkembangan masing-masing unsur dalam setiap komponen APBN selama periode waktu tahun anggaran 1999/2000–2001.

Sedangkan Bab IV adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2002 yang secara ringkas menjelaskan mengenai target pendapatan negara dan hibah, rencana belanja negara, kondisi keseimbangan umum dan defisit APBN, serta pembiayaan defisit anggaran

untuk tahun anggaran 2002. Di samping target besaran-besaran APBN secara nominal dan persentasenya terhadap PDB, Bab ini juga menguraikan berbagai langkah kebijakan atau rencana tindak yang akan ditempuh selama tahun anggaran 2002 yang diperkirakan akan mendukung pencapaian besaran-besaran yang dianggarkan dalam APBN 2002.

Sejalan dengan strategi jangka menengah untuk mengurangi defisit anggaran secara bertahap hingga mencapai posisi keseimbangan anggaran dalam tahun anggaran 2004/2005, maka defisit anggaran tahun anggaran 2002 diperkirakan pada tingkat 2,5 persen terhadap PDB dibandingkan dengan 3,7 persen terhadap PDB tahun 2001. Dengan sasaran pencapaian target defisit sebesar 2,5 persen terhadap PDB tersebut diperkirakan situasi keuangan negara dalam tahun anggaran 2002 secara umum masih sangat ketat.

Melalui Nota Keuangan dan APBN 2002 ini diharapkan pemerintah dapat memberikan penjelasan berkenaan dengan pokok-pokok program dan atau kegiatan, termasuk kebijakan yang menjadi landasannya, yang tercakup di dalam setiap komponen yang masuk dalam kelompok pendapatan negara dan hibah, belanja negara dan pembiayaan anggaran, serta penjelasan tentang asumsi-asumsi dasar yang dipergunakan dalam penyusunan APBN 2002 dan kaitannya dengan aspek ekonomi lainnya. Dengan demikian diharapkan agar semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*) dapat memahami kondisi perekonomian yang melingkupi dan mempengaruhi besaran-besaran yang diusulkan pemerintah dalam APBN 2002.

Secara umum situasi keuangan negara tahun 2002 masih ketat.

BAB II

ASUMSI DASAR PENYUSUNAN APBN 2002

PENDAHULUAN

Besaran-besaran APBN 2002 ditentukan oleh perkembangan ekonomi makro dan kebijakan fiskal tahun 2002.

Besaran-besaran APBN 2002 ditentukan terutama oleh perkiraan perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2002 secara keseluruhan dan berbagai kebijakan strategis pemerintah di bidang fiskal. Berbagai variabel ekonomi makro yang secara langsung mendasari penyusunan APBN 2002 meliputi pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (US\$), suku bunga SBI 3 bulan, harga minyak mentah internasional, dan tingkat produksi minyak mentah Indonesia.

Perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2002 dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi Indonesia tahun 2001, perkembangan ekonomi global dalam tahun 2002, kondisi sosial, politik dan keamanan dalam negeri tahun 2002, dan kebijakan ekonomi makro serta kebijakan restrukturisasi di berbagai bidang yang akan dilaksanakan dalam tahun 2002.

KINERJA EKONOMI INDONESIA TAHUN 2001

Perekonomian Indonesia tahun 2001 mengalami tekanan.

Dalam tahun 2001, perekonomian Indonesia mengalami tekanan yang cukup berat, terutama yang bersumber dari depresiasi rupiah yang berlebihan, laju inflasi yang relatif tinggi, naiknya suku bunga, serta tingginya risiko ketidakpastian yang bersumber dari kondisi politik dan keamanan dalam negeri. Selain itu, perkembangan perekonomian global yang lebih rendah dari yang diperkirakan semula turut memberikan tekanan yang kurang menguntungkan bagi perekonomian nasional. Sebagai antisipasi terhadap perkembangan tersebut di atas, pemerintah telah mengambil beberapa kebijakan di bidang fiskal dan melakukan penyesuaian terhadap perkiraan kinerja ekonomi Indonesia tahun 2001.

Selanjutnya, membaiknya kondisi politik dan keamanan dalam negeri seiring dengan lancarnya pergantian pemerintahan pada pertengahan tahun 2001, langkah antisipatif atas berbagai kebijakan fiskal yang diarahkan untuk tetap menjaga *fiscal sustainability* dengan memberikan stimulus ekonomi terbatas, serta kebijakan moneter yang akan diarahkan untuk menjaga kestabilan harga-harga dan nilai tukar rupiah, telah berperan untuk mengurangi tekanan yang berlebihan terhadap perkembangan ekonomi tahun 2001.

Kinerja ekonomi tahun 2001 menunjukkan pertumbuhan yang melambat.

Secara umum, kinerja perekonomian Indonesia tahun 2001 menunjukkan pertumbuhan yang melambat. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mencapai 3,5 persen. Pertumbuhan 2001 ini lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2000 sebesar 4,8 persen, namun masih lebih baik dari negara-negara tetangga. Sementara itu, laju inflasi selama tahun 2001 (y-o-y)

diperkirakan sebesar 11,9 persen, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat rata-rata Rp10.219, dan tingkat suku bunga SBI 3 bulan rata-rata 16,4 persen.

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

World Economic Outlook Desember 2001 memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia dalam tahun 2002 tidak lebih baik dari tahun 2001, yaitu sekitar 2,4 persen. Pertumbuhan ekonomi dunia yang relatif stagnan tersebut terutama ditengarai berasal dari melemahnya perekonomian dinegara-negara maju. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat diperkirakan melambat dari 1 persen dalam tahun 2001 menjadi 0,6 persen dalam tahun 2002. Ekonomi Jepang diperkirakan akan melemah dalam tahun 2002 dengan pertumbuhan negatif 1,0 persen setelah mengalami pertumbuhan negatif sebesar 0,4 persen dalam tahun 2001. Negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa juga mengalami pertumbuhan yang melambat dari 1,7 persen dalam tahun 2001 menjadi 1,3 persen dalam tahun 2002. Perkembangan ekonomi negara-negara maju yang melemah tersebut diperkirakan akan memberikan tantangan yang lebih besar bagi kinerja perekonomian Indonesia dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya dalam kaitannya dengan aktivitas perdagangan internasional dan menarik masuknya investasi asing. Oleh karena itu, selain mencari peluang sebaik-baiknya ditengah-tengah lesunya perekonomian negara-negara maju, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2002 diutamakan kepada bangkitnya kembali permintaan domestik sehubungan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat dan semakin mantapnya restrukturisasi ekonomi yang diupayakan dengan berbagai kebijakan ekonomi makro dan mikro secara komprehensif.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju tahun 2002 melemah dibandingkan dengan tahun 2001.

KONDISI SOSIAL, POLITIK, DAN KEAMANAN

Kondisi sosial, politik dan keamanan yang merupakan salah satu faktor penentu bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional diharapkan semakin membaik secara signifikan dalam tahun 2002. Sukses dan lancarnya pergantian kepemimpinan nasional sesuai hasil Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tanggal 23–26 Juli 2001 diperkirakan merupakan awal membaiknya kondisi sosial, politik, dan keamanan dalam negeri. Kondisi tersebut diperkirakan akan semakin membaik seiring dengan berjalannya waktu sampai akhir tahun 2001. Selanjutnya dalam tahun 2002 kondisi sosial, politik, dan keamanan diharapkan akan semakin baik dan mantap. Membaiknya stabilitas sosial, politik, dan keamanan dalam tahun 2002 secara signifikan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia dan luar negeri akan masa depan perekonomian Indonesia. Meningkatnya kepercayaan masyarakat tersebut akan mendorong pertumbuhan konsumsi dan investasi masyarakat, serta mendorong meningkatnya investasi luar negeri ke Indonesia, baik investasi langsung maupun investasi tidak langsung. Hal ini lebih lanjut akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kinerja ekonomi Indonesia.

Kondisi sosial, politik, dan keamanan diharapkan semakin membaik pada tahun 2002.

KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO INDONESIA TAHUN 2002

Kebijakan ekonomi makro tahun 2002 diarahkan untuk mencapai pemulihan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan moneter diarahkan pada pengendalian inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Target pertumbuhan uang primer tahun 2002 sekitar 12-14 persen.

Kebijakan keuangan negara akan dilaksanakan secara selaras dan konsisten dengan kebijakan ekonomi makro lainnya.

Transparansi dan akuntabilitas BPPN harus tetap dijaga dalam pelaksanaan tugas-tugasnya

Reformasi di berbagai bidang diperlukan untuk memperkuat fundamental ekonomi.

Dalam tahun 2002, kebijakan ekonomi makro diarahkan untuk mencapai pemulihan ekonomi berkelanjutan yang lebih bertumpu pada kemampuan sendiri (*self-sustained recovery*) yang akan diupayakan melalui serangkaian kebijakan moneter, fiskal, restrukturisasi perusahaan dan pemulihan aset-aset BPPN, serta kebijakan restrukturisasi di berbagai sektor publik.

Dalam tahun 2002, kebijakan moneter akan tetap diarahkan pada upaya pengendalian tekanan inflasi dan stabilisasi nilai tukar rupiah. Untuk itu, kebijakan moneter akan terus dilakukan untuk meminimalisasi kelebihan likuiditas dalam perekonomian. Dalam pelaksanaannya, kebijakan moneter akan dilakukan secara hati-hati untuk mencegah terjadinya kenaikan suku bunga secara drastis dan berlebihan, sehingga tidak membahayakan proses pemulihan perbankan dan perekonomian secara keseluruhan. Penyerapan kelebihan likuiditas tersebut dilakukan terutama melalui Operasi Pasar Terbuka (OPT), khususnya lelang Sertifikat Bank Indonesia (SBI), intervensi rupiah dan sterilisasi valas.

Sejalan dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi nasional, target inflasi, dan perkiraan nilai tukar rupiah, maka tingkat pertumbuhan uang primer dalam tahun 2002 ditargetkan sekitar 12–14 persen.

Sementara itu, kebijakan keuangan negara dalam tahun 2002 tetap diarahkan pada upaya untuk mewujudkan APBN yang sehat, memelihara ketahanan fiskal yang berkelanjutan, dan memberikan stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan negara guna mendukung proses pemulihan ekonomi. Kebijakan keuangan negara tersebut akan dilaksanakan secara selaras dan konsisten dengan kebijakan ekonomi makro lainnya.

Kinerja Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) merupakan salah satu kunci pokok dalam rangka pemulihan kembali ekonomi Indonesia. Peranan BPPN sangat penting dan strategis dalam proses restrukturisasi perusahaan, baik bank maupun bukan bank. Oleh karena itu, transparansi dan akuntabilitas BPPN akan tetap dijaga dalam rangka menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas BPPN. Sementara itu, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KSK) dan Komite Pengawas (*Oversight Committee*) juga akan didorong untuk melaksanakan tugasnya secara lebih optimal.

Untuk memperkuat fundamental ekonomi bagi proses pertumbuhan ekonomi jangka menengah, pemerintah juga akan melaksanakan reformasi struktural di berbagai bidang, seperti perbaikan sistem pengadaan sektor publik dan kebijakan pengelolaan keuangan, reformasi BUMN, reformasi pelayanan publik, dan program pengentasan kemiskinan. Selain itu, fungsi pengawasan internal pemerintah akan ditingkatkan sehingga mampu mengidentifikasi dengan cepat dan tepat orang/pejabat yang bertanggung jawab atas terjadinya kasus-kasus yang merugikan negara dan selanjutnya diambil tindakan hukum secara konkrit.

INDIKATOR EKONOMI MAKRO DALAM APBN 2002

Dengan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, kinerja ekonomi Indonesia dalam tahun 2002 diperkirakan akan mengalami kemajuan dibandingkan dengan tahun 2001. Secara garis besar kemajuan tersebut tercermin pada beberapa indikator utama ekonomi makro, yang digunakan sebagai dasar penentuan besaran-besaran APBN 2002.

Salah satu faktor penting dalam mencapai kinerja ekonomi tersebut adalah adanya koordinasi yang baik antara kebijakan fiskal dan moneter. Oleh karena itu, koordinasi tersebut akan semakin ditingkatkan dan dimantapkan dalam tahun 2002.

Kinerja ekonomi nasional tahun 2002 diperkirakan semakin baik.

Koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan semakin meningkat.

Tabel II.1
Kerangka Ekonomi Makro, 2001 – 2002

Indikator	2001*)	2002*)
1. Pertumbuhan ekonomi (persen)	3,5	4,0
2. Inflasi (persen)	11,9	9,0
3. Nilai tukar rupiah per US\$	10.219	9.000
4. Suku bunga SBI 3 bulan (persen)	16,4	14,0
5. Harga minyak internasional (US\$/barel)	24,6	22,0
6. Produksi minyak Indonesia (juta barel/hari)	1,32	1,32

*) Perkiraan

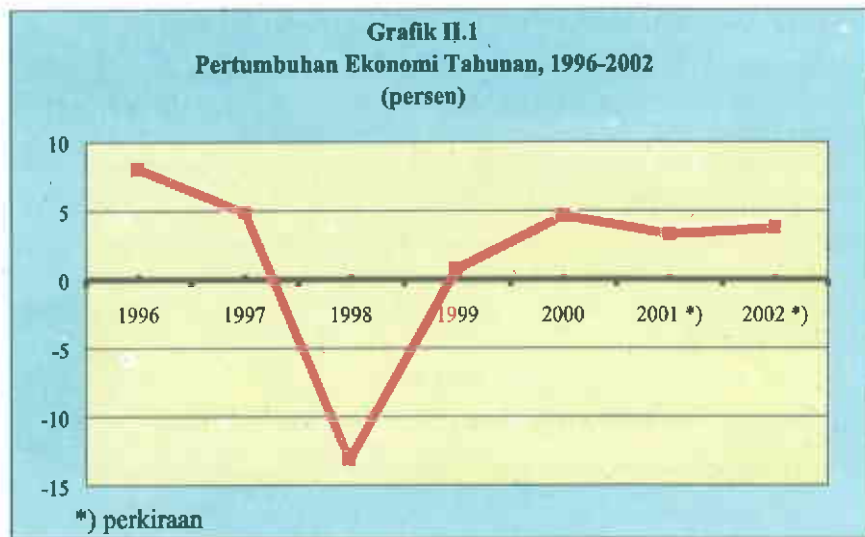
PERTUMBUHAN EKONOMI

Setelah tumbuh sebesar 4,8 persen dalam tahun 2000, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih rendah dalam tahun 2001, yaitu sebesar 3,5 persen. Namun, dalam tahun 2002 pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan menguat kembali menjadi 4 persen.

Perkiraan tersebut didasarkan pada ekspektasi akan membaiknya berbagai faktor ekonomi dan nonekonomi terutama dari sisi internal. Secara sektoral, pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri pengolahan, dan sektor lainnya diperkirakan masing-masing mencapai sebesar 1,4 persen, 5,6 persen, dan 4,0 persen. Dari sisi permintaan konsumsi diperkirakan akan menyumbang sebesar 2,9 persen dan investasi sebesar 1,8 persen. Sementara itu sektor eksternal (ekspor bersih) menyumbang sebesar negatif 0,7 persen yang terdiri dari ekspor sebesar 2,9 persen dan impor sebesar negatif 3,6 persen.

Membaiknya konsumsi terutama didorong oleh konsumsi swasta. Hal tersebut selain disebabkan oleh membaiknya ekspektasi masyarakat akan masa depan perekonomian Indonesia, juga dipengaruhi oleh kondisi tingkat harga di dalam negeri yang relatif terkendali sehingga daya beli masyarakat semakin baik. Disamping itu, suku bunga yang menurun juga diperkirakan akan mendorong pertumbuhan konsumsi swasta.

Sumber pertumbuhan ekonomi tahun 2002 didorong oleh konsumsi swasta, investasi dan ekspor.



Kinerja investasi tahun 2002 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2001. Membaiknya kondisi sosial, politik, dan keamanan, serta proses restrukturisasi perbankan, perusahaan, hutang luar negeri swasta diharapkan akan mampu mendorong perkembangan sektor riil terutama melalui peningkatan penyaluran kredit kepada sektor swasta dan peningkatan arus masuk modal asing (PMA), baik berupa investasi portofolio maupun investasi langsung.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju dalam tahun 2002 diperkirakan akan melemah dibandingkan dengan tahun 2001, sehingga menekan permintaan ekspor Indonesia, khususnya ekspor bukan minyak bumi dan gas alam. Selain itu, harga minyak dunia diperkirakan akan sedikit lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sehingga penerimaan ekspor minyak bumi dan gas alam diperkirakan akan lebih rendah. Sekalipun demikian, total ekspor diperkirakan masih tumbuh lebih tinggi dibanding tahun 2001, yang terutama didukung oleh ekspor nonmigas. Hal ini dengan pertimbangan bahwa restrukturisasi ekonomi dalam negeri berjalan lebih baik sehingga daya saing ekspor Indonesia semakin tinggi, di samping ekspor utama Indonesia adalah produk-produk yang permintaannya cukup tinggi. Demikian juga halnya dengan impor diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi sejalan dengan meningkatnya kegiatan perekonomian dalam negeri.

LAJU INFLASI

Tekanan inflasi dalam tahun 2001 disebabkan oleh kebijakan harga dan melemahnya nilai tukar rupiah.

Selama tahun 2001 inflasi diperkirakan mencapai 11,9 persen yang disebabkan oleh melemahnya kurs rupiah yang diikuti dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) pada bulan Juni, serta tingginya permintaan akan barang jasa yang disebabkan oleh berlangsungnya hari raya keagamaan secara bersamaan menjelang akhir tahun. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM dan TDL tersebut

Pertama, adanya rencana penyesuaian tunjangan bagi beberapa jabatan fungsional tertentu yang selama beberapa tahun terakhir belum pernah mengalami kenaikan. *Kedua*, diperlukannya anggaran untuk menampung kenaikan pangkat/golongan, dan kenaikan gaji berkala (*acress*). Sementara itu, pagu anggaran uang makan dan lauk pauk direncanakan naik dari Rp2,1 triliun atau 0,1 persen dari PDB pada tahun 2001 menjadi Rp2,8 triliun atau 0,2 persen dari PDB pada tahun 2002 karena adanya rencana kenaikan uang makan dan lauk pauk bagi anggota TNI dan Polri sebesar Rp2.500 per orang per hari. Dalam pada itu, komponen belanja pegawai lainnya, seperti tunjangan beras, lain-lain belanja pegawai dalam negeri serta belanja pegawai luar negeri hampir tidak mengalami perubahan dari beban tahun sebelumnya, yaitu masing-masing sekitar 0,1 persen terhadap PDB.

Alokasi anggaran untuk belanja barang tahun 2002 secara nominal naik sekitar 34,4 persen dari tahun 2001.

Seperti halnya pada belanja pegawai, anggaran yang dialokasikan untuk belanja barang secara nominal naik sekitar 34,4 persen, dari Rp9,6 triliun atau 0,7 persen dari PDB dalam APBN-P tahun anggaran 2001 menjadi Rp12,9 triliun atau 0,8 persen dari PDB pada tahun 2002. Anggaran tersebut diperlukan untuk mendukung lancarnya kegiatan operasional pemerintahan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta menunjang tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Anggaran belanja barang dalam negeri akan dialokasikan antara lain untuk pengadaan sarana kerja, biaya langganan daya dan jasa, biaya perjalanan dinas pada seluruh departemen/LPND, serta memenuhi biaya pemeliharaan berbagai aset negara dan hasil pembangunan. Sedangkan anggaran belanja barang luar negeri akan digunakan terutama untuk mendukung kegiatan operasional kantor-kantor perwakilan pemerintah di berbagai negara sahabat.

Alokasi anggaran untuk pengeluaran rutin lainnya tahun 2002 sekitar 0,6 persen terhadap PDB.

Di lain pihak alokasi anggaran untuk pengeluaran rutin lainnya dalam tahun 2002 diperkirakan mencapai sekitar 0,6 persen terhadap PDB. Alokasi anggaran pengeluaran rutin lainnya tersebut antara lain direncanakan untuk pengembalian dana reboisasi, pembayaran jasa surveyor, bantuan untuk partai politik dan biaya sidang tahunan MPR-RI, pembayaran tunggakan dan klaim pihak ketiga, biaya perawatan beras Bulog, serta bantuan kepada KONI. Di luar pos-pos tersebut, pengeluaran rutin lainnya juga menampung dana cadangan tanggap darurat yang akan digunakan antara lain untuk penanggulangan masalah pengungsi, bencana alam, serta mengantisipasi terjadinya ketidaksesuaian rencana tindak (*policy measures*) dengan implementasinya.

PENGELUARAN PEMBANGUNAN

Pengeluaran pembangunan tahun anggaran 2002 ditetapkan sekitar 3,1 persen dari PDB, secara nominal naik sekitar 32,7 persen.

Dalam tahun anggaran 2002 pengeluaran pembangunan yang dikelola pemerintah pusat ditetapkan Rp52,3 triliun atau sekitar 3,1 persen terhadap PDB. Jumlah ini secara nominal naik sekitar 32,7 persen dari perkiraan realisasi anggaran belanja pembangunan pemerintah pusat dalam tahun anggaran 2001.

Sesuai dengan semangat otonomi daerah, pengeluaran pembangunan pemerintah pusat digunakan terutama untuk membiayai tugas dan kewenangan pemerintah pusat yang meliputi bidang agama, hukum, aparaturnegara,

masing KK yang menjadi target subsidi akan menerima 20 kilogram beras per bulan selama 12 bulan, dengan harga Rp1.000,00 per kilogram. Selain merupakan operasi pasar yang bersifat rutin, sebagian dari program ini merupakan salah satu bentuk kompensasi langsung kepada masyarakat kurang mampu yang terkena dampak kenaikan harga BBM dan TDL.

Dalam pada itu beban subsidi bunga kredit program akan dialokasikan untuk memenuhi kewajiban pemerintah atas beban subsidi bunga berbagai skim kredit program, baik kredit yang pendanaannya berasal dari eks-KLBI, surat utang yang dikelola oleh tiga BUMN, yaitu PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI), maupun bank-bank umum yang ikut serta dalam penyediaan kredit usaha tani (KUT) dan kredit ketahanan pangan (KKP).

Dalam tahun anggaran 2002, beban bunga utang ditetapkan Rp88,5 triliun atau sekitar 5,3 persen terhadap PDB, turun 1,2 persen terhadap PDB dari beban pembayaran bunga utang dalam APBN-P tahun anggaran 2001 sebesar 6,5 persen terhadap PDB. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya beban bunga utang dalam negeri maupun bunga utang luar negeri dari masing-masing 4,5 persen terhadap PDB dan 2,0 persen terhadap PDB dalam tahun 2001 menjadi 3,5 persen terhadap PDB dan 1,7 persen terhadap PDB pada tahun 2002.

Beban pembayaran bunga utang dalam negeri untuk tahun 2002 ditetapkan Rp59,5 triliun atau sekitar 67,2 persen dari total beban bunga utang, sedangkan sekitar 32,8 persen (Rp29,0 triliun) merupakan bunga utang luar negeri. Upaya untuk mengurangi beban bunga utang dalam negeri antara lain dilakukan melalui program pertukaran antara aset-aset yang telah direstrukturisasi dengan obligasi yang dimiliki bank-bank (*asset-bonds swap*). Selain itu, karena pengaruh suku bunga (SBI 3 bulan) mempunyai peranan yang cukup signifikan terhadap pembengkakan beban pembayaran bunga utang dalam negeri, khususnya yang bersumber dari obligasi dengan tingkat bunga mengambang (*variable rate*), maka koordinasi dengan pihak otoritas moneter menjadi faktor yang sangat penting dalam mengupayakan kestabilan suku bunga SBI pada tingkat yang wajar dan realistis.

Sementara itu, upaya untuk mengurangi beban pembayaran bunga utang luar negeri akan ditempuh antara lain dengan (i) mengurangi jumlah pinjaman luar negeri baru (*new loan*) secara bertahap, (ii) mengupayakan pinjaman baru dengan persyaratan yang seringan mungkin, dan (iii) mempercepat penarikan komitmen pinjaman yang sudah ada.

Di lain pihak, alokasi anggaran yang disediakan untuk belanja pegawai pusat dalam tahun anggaran 2002 diperkirakan mencapai Rp41,3 triliun (2,5 persen terhadap PDB), naik sekitar 4,6 persen bila dibandingkan dengan belanja pegawai pada APBN-P tahun anggaran 2001. Peningkatan beban belanja pegawai dalam tahun 2002 tersebut terutama disebabkan oleh naiknya alokasi anggaran untuk gaji dan pensiun serta uang makan dan lauk pauk. Alokasi anggaran gaji dan pensiun ditetapkankan naik dari Rp33,3 triliun atau 2,3 persen terhadap PDB dalam tahun 2001 menjadi Rp34,0 triliun atau 2,0 persen terhadap PDB dalam tahun 2002. Ada dua faktor penyebab naiknya anggaran gaji dan pensiun dalam tahun anggaran 2002.

Subsidi bunga kredit program merupakan subsidi bunga atas skim kredit program eks KLBI.

Beban bunga utang tahun 2002 turun 1,2 persen terhadap PDB dari tahun 2001.

Upaya mengurangi beban bunga utang dalam negeri akan dilakukan melalui asset-bonds-swap, di samping koordinasi dengan otoritas moneter untuk mengusahakan suku bunga SBI yang wajar.

Pengurangan beban bunga utang luar negeri dilakukan antara lain dengan membatasi pinjaman baru.

Belanja pegawai pusat naik sekitar 4,6 persen dari beban tahun sebelumnya, karena adanya rencana penyesuaian beberapa jenis tunjangan fungsional tertentu yang selama ini belum pernah dinaikkan.